

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLAH LEMBAGA KEROHANIAN

Oktavianus Pasoloran^{1*}, Anggito Pratama Paembonan, Fransiskus Randa

^{1,2,3} Universitas Atmajaya Makassar

¹ pasolorano@gmail.com

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja)

² anggitopaembonan@gmail.com

³ tatoranda@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the implementation of spiritual institution) in the Conference Area Adventist spritual institutionorganization and the practice of financial reporting of Adventist spritual institutionorganizations in accordance with the principles of good governance. This research is a qualitative research where the primary data is obtained from the results of interviews with the leadership of the Seventh-day Adventist Spritual institutionorganization in the Conference Area. While secondary data is additional data. The results show that first, the mechanism for implementing Spiritual institutionin the Conference Area Adventist Spritual institutionorganization through the Conference Area Executive Committee (EXCOM) as the board of directors, the Finance Committee as the committee that evaluates financial reports and audit results of the congregation and conference area financial statements, internal auditors are carried out by the spritual institutionauditors and the General Conference Auditing Service (GCAS). The results of this study indicate that the Conference Area Adventist spritual institutionorganization has good management governance. Several improvements can be made by establishing a more independent audit committee and optimizing the work of the internal auditors. Second, in general, the practice of financial reporting in the working environment of the spiritual institution in the Conference Area is in accordance with the principles of good governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Improvements need to be made to the communication media to the congregations so that financial supervision and management are more efficient, effective, economical, and productive (E3P).

Keywords: *Good Spritual institution Governance, Institusi kerohanian*

*) Dosen Universitas Atmajaya Makassar, pasolorano@gmail.com

PENDAHULUAN

Tata kelola (*governance*) dalam istilah sederhana berarti bagaimana organisasi diarahkan, dikendalikan, dan dimintai pertanggungjawaban. Tata kelola juga mencakup kebijakan, strategi, rencana, proses, dan pengaturan yang mengarahkan organisasi ke arah yang benar. (Br Damanik, 2021) Tata kelola mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi menetapkan dan mencapai tujuannya. Tata kelola yang baik (*good governance*) adalah praktik berkelanjutan untuk mengarahkan organisasi ke arah yang memungkinkannya berhasil dalam misinya, mengelola risikonya, memanfaatkan peluang, dan mematuhi undang-undang dan peraturan. Tata kelola yang baik menetapkan budaya yang tepat, bekerja untuk kepentingan terbaik organisasi, dan menumbuhkan kepercayaan dan reputasi yang baik.

Salah satu masalah dalam tata kelola adalah pengelolaan keuangan dalam mendukung kemandirian dana. Sumber pendanaan institusi kerohanian berasal dari persembahan dan sumbangan sukarela dari anggota jemaat dalam mendanai seluruh aktivitas pelayanan institusi kerohanian. Kemandirian dana harus dipahami sebagai kemampuan institusi kerohanian untuk mengali sumber-sumber kekayaan dan untuk melipatgandakan, mengamankan dan menggunakan secara tepat guna harta benda yang diberikan Tuhan untuk pelaksanaan misi institusi kerohanian. Dengan demikian program kemandirian di bidang dana harus ditunjukkan pada peningkatan kemampuan institusi kerohanian dan warganya untuk mengelola seluruh penatalayanan. Sebagian besar pengelolaan keuangan pada organisasi institusi kerohanian belum optimal karena fokus lebih banyak ditujukan pada pelaksanaan program-program pelayanan.

Good governance membahas bagaimana organisasi dan komunitas berinteraksi dengan orang-orang di dalamnya; bagaimana keputusan-keputusan penting diambil; bagaimana proses keterlibatan mereka; dan bagaimana

membuat pertanggungjawaban di tengah-tengah persoalan dan masalah dunia yang kompleks (Graham, et.al., 2003). Hal lainnya juga terkait dengan sistem yang mengatur tentang persetujuan-persetujuan, prosedur-prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang menjelaskan siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana pertanggungjawaban dibuat. Konsep *good governance* selalu disandingkan dengan keselarasannya dengan peraturan hukum (*the rule of law*) yang menjadi pijakannya dan member ruang bagi kehidupan demokrasi bersama (Addink, 2019). Peraturan hukum diaplikasikan secara setara kepada setiap anggotanya dan penggunaan kekuasaan dikondisikan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan (Bevir, 2009).

Tidak dapat disangkal bahwa organisasi institusi kerohanian saat ini berada di bawah tekanan untuk lebih efisien dan mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek sosial dan ekonomi serta berbagai dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan akuntabilitas pengelolaan sumber daya pelayanan yang lebih transparan dan responsif terhadap setiap kegiatan pelayanan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan standar akuntabilitas, perilaku dan kinerja. Akuntabilitas adalah tingkat transparansi, tingkat pengungkapan informasi, dan penjelasan tentang kebijakan dan tindakan organisasi kepada siapa organisasi tersebut bertanggung jawab. Dalam prakteknya akuntabilitas dan efektivitas merupakan dua hal yang saling berkaitan, akuntabilitas dapat memacu kinerja. Tuntutan tersebut memaksa institusi kerohanian mengadopsi berbagai konsep manajemen modern.(Samsuddin, 2016)

Spiritual institution adalah prinsip yang dapat dianut oleh organisasi institusi kerohanian dalam meningkatkan pengelolaan organisasi institusi kerohanian seperti persiapan dan pelaksanaan program, pengambilan keputusan, administrasi pelayanan dan administrasi keuangan, pertanggungjawaban keuangan, pemeriksaan, pengawasan dan atau verifikasi. Penghayatan yang mendalam terhadap konsep penatalayanan dan prinsip akuntabilitas merupakan aspek penting dalam mewujudkan *Tata kelolah kelembagaan(GCG)* (Elviana & Niswah, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif. Dilaksanakan di gereja mahasehi advent hari ke tuju Menurut Denzin dan Lincoln (2009), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Metode penelitian kualitatif bisa sangat sesuai untuk tahap awal dalam proyek penelitian (Pasak, 2010). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang berfokus pada suatu organisasi institusi kerohanian yaitu Institusi kerohanian Masehi Advent Hari Ketujuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur dan Mekanisme *Spiritual institution Governance* pada Organisasi GMAHK

Dalam buku peraturan institusi kerohanian, revisi 2010 (35) dinyatakan :
“*bentuk pemerintahan Institusi kerohanian Masehi Advent Hari Ketujuh adalah*

representatif atau perwakilan yang mengakui bahwa kekuasaan dalam institusi kerohanian terletak pada anggota-anggota institusi kerohanian itu dan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada badan perwakilan dan kepada pegawai-pegawai untuk memerintah Institusi kerohanian itu pada masing-masing tingkatan". Dari pernyataan tersebut organisasi institusi kerohanian dijalankan oleh pihak manajemen dan anggota-anggota institusi kerohanian yang terpilih (dewan). Pihak manajemen menjalankan organisasi secara struktural dalam pengambilan keputusan, kebijakan, *strategic planning*, dan pengelolaan sumber daya organisasi. Sedangkan anggota dewan sebagai badan perwakilan melakukan pengarahan, pengendalian, dan pengawasan sehingga tercipta *check and balances* diantara anggota jemaat dan manajemen dalam bentuk pertanggungjawaban dalam kerangka *Good Spritual institution Governance*.

Pergantian Pimpinan daerah konferens, Direktur/Wakil Direktur serta anggota Executive Daerah Konferens diadakan setiap lima tahun. Konflik kepentingan sering terjadi dalam konferensi dan tidak dapat dihindari karena utusan-utusan jemaat ikut berpartisipasi dalam menganalisa dan mengomentari laporan pertanggungjawaban dari pimpinan daerah konferens baik dari segi kinerja maupun angka-angka yang tertera dalam laporan.

Dari perspektif *leadership* peran pimpinan daerah konferens sangat krusial dalam memimpin organisasi dalam usaha mencapai tujuan-tujuan organisasi. Selain itu, pimpinan juga menjalankan fungsi komunikasi baik kedalam maupun keluar organisasi secara efektif, rasional, objektif, dan netral. Jemat-jemaat ikut mengawasi pimpinan daerah konferens (*principal watch agent*) sehingga pengawasan dilaksanakan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah melalui organisasi tertinggi (*agent watch agent*). Hal ini membuat rencana strategis, evaluasi kinerja keuangan dan non keuangan menjadi sangat krusial dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menjaga hubungan antara anggota jemaat dengan organisasi institusi kerohanian advent merupakan misi institusi kerohanian advent, sehingga setiap individu wajib menjalankan dan menyelesaikan misi tersebut. Oleh karena itu, pekerjaan pelayanan secara internal maupun eksternal tetap dijalankan meskipun sering terjadi *conflict of interest* namun misi institusi kerohanian tetap yang utama.

Organisasi dianggap perlu membuat struktur yang menjelaskan distribusi hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang memiliki keterlibatan dalam organisasi agar kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang baik dapat dilakukan (*good governance*). Pada praktik manajemen organisasi institusi

kerohanian advent ketua daerah konferens juga merupakan ketua komite eksekutif daerah konferens (*CEO duality*). Secara otomatis ketua daerah konferens adalah perwakilan daerah yang akan menjadi anggota komite eksekutif uni konferens (organisasi tertinggi).

Komite eksekutif sebagai dewan direksi memiliki wewenang dalam mengawasi, menetapkan anggaran, menyetujui pengangkatan pegawai dan pendeta index serta berperan dalam merancang rencana strategis lima tahunan di daerah konferens. Anggota komite eksekutif juga melaporkan masalah yang terjadi di tingkat jemaat kepada pimpinan daerah konferens serta membahas penyelesaian masalah yang sesuai dengan kebutuhan jemaat dalam rapat tahunan. Anggota komite eksekutif melakukan peranannya sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Selain itu, berperan juga dalam mengusulkan penambahan pegawai di sekolah-sekolah yang dibimbing oleh jemaat serta penambahan pendeta di wilayah kerja yang membutuhkan.

2. Komite Keuangan

Komite keuangan ialah salah satu komite *ad hoc* yang ditetapkan oleh pimpinan daerah konferens setelah mendapat persetujuan dalam rapat bersama Komite Eksekutif daerah Konferens. Komite Keuangan dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan. Fungsi komite keuangan dalam hubungan secara struktural antara lain memastikan bahwa *Seventh-day Adventist Accounting Manual* sebagai pedoman pelaporan keuangan telah diterapkan dan sesuai dalam pelaporan keuangan daerah konferens, mengetahui kondisi keuangan, serta pengambilan keputusan dalam pengelolaan agar sesuai dengan misi organisasi.

3. Komite Administrasi

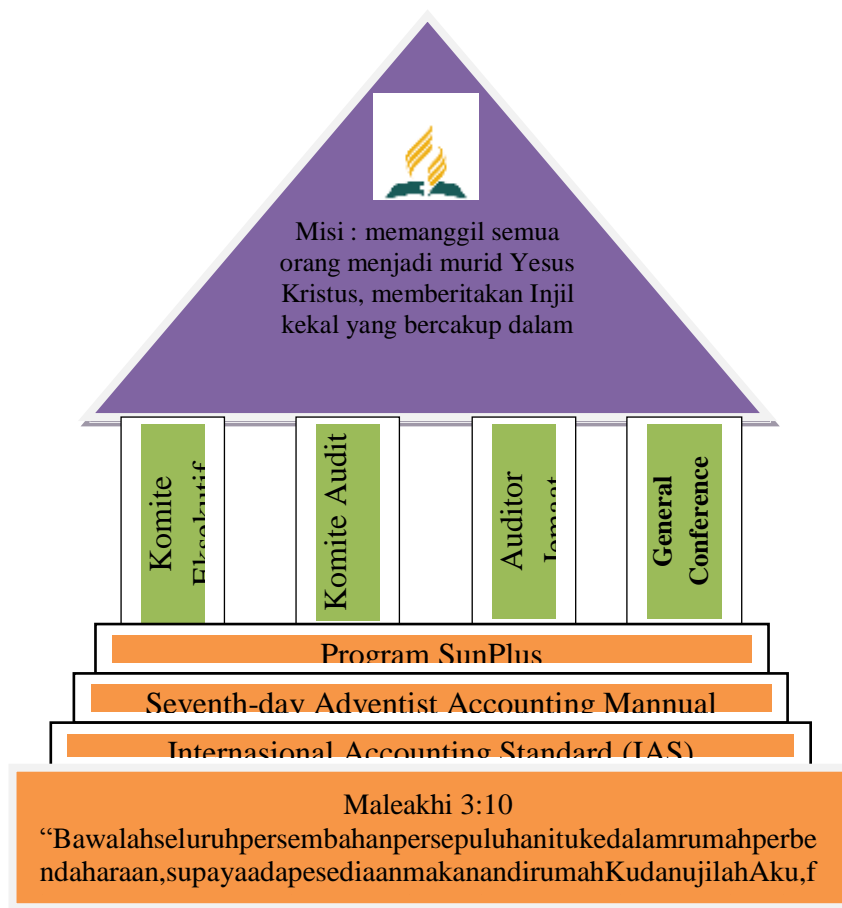
Komite administrasi merupakan salah satu komite yang berperan krusial dalam bidang administrasi daerah konferens. Selain itu, Komite Administrasi juga berperan dalam menyetujui permintaan dan pengeluaran dana. Dalam hal dana, Komite Administrasi membuat Surat Keputusan yang memuat jumlah dana yang disetujui dan pembebanan pengeluaran. Fungsi lain dari Komite Administrasi ialah sebagai komite awal yang menyaring semua agenda dari departemen-departemen, jemaat, institusi/lembaga sebelum dilakukan komite eksekutif-EXCOM. Semua agenda yang akan dibahas dalam Komite Administrasi terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Komite Eksekutif Daerah Konferens.

B. Model Tata kelolah kelembagaanpada Organisasi GMAHK

Misi GMAHK ialah mempersiapkan umat Tuhan dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Misi tersebut diwujudkan dalam bentuk program-program maupun pelayanan penginjilan kepada anggota jemaat dan sesama. Selanjutnya sumber daya ekonomi sebagai pondasi pengelolaan organisasi perlu disusun dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota jemaat. Laporan keuangan disusun berdasarkan aturan ataupun pedoman yang telah disepakati bersama. Tujuan dibuatnya pedoman laporan keuangan antara lain untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, untuk keseragaman laporan keuangan, serta mempermudah auditor maupun anggota jemaat dalam membaca laporan keuangan.

Gambar 1

Model Tata kelolah kelembagaanpada Organisasi GMAHK



Pilar pertama ialah Komite Eksekutif Daerah Konferens. Anggota komite eksekutif daerah konferens terdiri atas 2 yaitu perwakilan dari anggota jemaat (kaum awam) dan perwakilan dari pendeta yang semuanya dipilih dalam konferensi daerah. Perwakilan anggota jemaat berlatar belakang pengusaha, birokrat, dan profesional. Fungsi dari komite eksekutif daerah konferens ialah melakukan pengawasan, memutuskan anggaran, menyetujui pengangkatan pegawai dan pendeta serta membantu organisasi dalam merancang rencana strategis (renstra) daerah konferens selama lima tahun.

Pilar kedua ialah komite audit. Peran komite audit dalam penerapan *Tata kelolah kelembagaan* ialah memastikan bahwa organisasi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan komite audit berperan dalam mengomunikasikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan dan aturan, pendapatan dan pengeluaran, biaya dan gaji ke jemaat-jemaat. Selain itu juga secara efektif melaksanakan fungsi pengawasan terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karywan organisasi.

Auditor jemaat sebagai pilar ketiga berfungsi untuk mengaudit laporan keuangan yang dibuat oleh jemaat setiap bulan. Auditor jemaat juga melakukan audit laporan keuangan di institusi-institusi yang berada di wilayah kerja daerah konferens seperti sekolah (SD,SMP,SMA) kecuali Rumah Sakit dan Universitas. Struktur auditor jemaat terdiri dari *chief auditor*, auditor jemaat, dan staf auditor. Peran auditor jemaat dalam *Tata kelolah kelembagaan* ialah meningkatkan kepercayaan jemaat terhadap bendahara dalam pengelolaan keuangan jemaat.

Pilar keempat ialah *General Conference Auditing Service (GCAS)*. GCAS merupakan internal auditor yang memberikan opini terhadap pelaporan keuangan di konferens. Dari persepektif *Tata kelolah kelembagaan* keberadaan GCAS menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol dari organisasi tertinggi terhadap pengelolaan keuangan di daerah konferens. Keberadaan GCAS ialah untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi (persepuluhan dan persembahan) telah digunakan sesuai dengan ketentuannya.

SIMPULAN

Organisasi institusi kerohanian advent dalam menjalankan organisasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Tata kelolah kelembagaan* dimana terdapat Komite Keuangan, Komite Administrasi, Komite Eksekutif, dan Komite Audit sekaligus menjadi pilar dalam membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan institusi kerohanian. Model pada Organisasi GMAHK digambarkan sebagai sebuah bangunan yang kokoh yang dibangun atas dasar

Firman Tuhan. Pada tataran operasional penyusunan laporan keuangan dalam organisasi institusi kerohanian advent disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum (*Internasional Accounting Standard*) yang dilaksanakan dalam bentuk *Seventh-day Accounting Manual*, dan Program SunPlus. Pilar-pilar tata kelola adalah komite-komite yang dibentuk yang menjalankan fungsi tata kelola keuangan dan audit. Puncak tertinggi model *Tata kelola kelembagaan* adalah pencapaian misi organisasi yaitu mempersiapkan dunia bagi kedatangan Tuhan Yesus.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, Henk. 2019. *Good Governance Concept and Context*. Oxford: Oxford Press.
- Aini, N. (2019). Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1). <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2671>
- Awuku- Gyampoh, R. K., & Ohemeng Asare, A. (2019). Assessing the Impact of Good Governance, Church Management and Structure on the Growth and Development of the Church. *International Journal of Business and Management*, 14(4). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v14n4p99>
- Bevir, Mark. 2009. *Key Concepts in Governance*. Los Angeles, CA: SAGE Publications.
- Br Damanik, I. H. (2021). PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE). *Juripol*, 4(1). <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11030>
- Coetzee, M.H. & Conradie, E.M., 2012, 'Dominante teologiese sleutels in die Ned Geref Kerk na 1974', *Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif* 53 (3/4), 90–108
- Committee Cadbury. 1992. *Report on the Financial Aspects of Corporate Governance*, Gee and Company Limited, London.
- Denzin, N., & Lincoln, Y, 2009. *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Enofe, A., Amaria, P. 2011. The Role of the Spiritual institution Denomination in Financial Accountability Among Religious Organization. *International Journal of Business, Accounting and Finance*, Volume 5, Number 2: 87-104.

- Elviana, N., & Niswah, F. (2018). Akuntabilitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban). *Publika*, 8(1).
- FCGI 2002. Peranan *Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jilid II. FCGI. Edisi ke-2.
- Graham, John, Bruce Amos, dan Tim Plumptre. 2003 Principles for Good Governance in the 21st Century Policy Brief No.15, 2. Ottawa: Institute On Governance.
- Institusi kerohanian Masehi Advent Hari Ketujuh. (2011). Peraturan Jemaat. Edisi Ke 18. Indonesia Publishing House : Bandung.
- Karongkeng, H.F. 2013. Penerapan Good Corporate Governance di Organisasi Institusi kerohanian : Studi Kasus di Daerah Konferens Manado, Minahasa Utara, Bitung & Maluku Utara. Repository UKSW : Salatiga.
- Korengkeng, D. E. S., Lumoindong, G. E., & Shandery, T. (2022). Pendidikan Iman dalam Perspektif Teologi Pentakosta. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.5608>
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. September 15, 2011.
- Leonne, A.J., Van Horne, R.L. 2005. How Do Nonprofit Hospitals Manage Earnings?. *Journal of Health Economics*, 24 (4): 815-837.
- Pasoloran, O., Rahman, F.A. 2001. Teori Stewardship : Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Public. In *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* (Vol.3, Issue 2, Pp.418-432).
- Qamariyah, F. (2018). Waroeng Steak: Spritual Company in the Context of Post-Capitalism. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i2.165>
- Ribka, J. (2006). Persepsi Manajemen Dan Anggota Jemaat Terhadap Praktik Akuntabilitas Dan Transparansi Keunagan Dalam Lembaga Institusi kerohanian Kristen. 2011, 1-6.
- Robbins, S.P., Matthew, M. 2009. *Organization Theory: Structure, Design, and Applications*, 3rd edition. Pearson Education.
- Robert, J., Scapens, R. 1985. Accounting systems and systems of accountability understanding accounting practices in their organizational context. *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 10 No. 4, pp 443-56.
- Samsuddin. (2016). KINERJA PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Dinas Kependuduk-an dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi). *JIP*

- (*Jurnal Ilmu Pemerintahan*) : *Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2). <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.314-322>
- Santoso, J. (2020). Pelayanan Hamba Tuhan dalam Tugas Penggembalaan Jemaat. *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI*, 9(1). <https://doi.org/10.46495/sdjt.v9i1.55>
- Sedarmayanti. (2012). Good governance & Good Corporate Governance. In *CV. Mandar Maju*.
- Sukmawati, F., Pujningsih, S., & Laily, N. 2016. Akuntabilitas Institusi kerohanian Dalam Persepektif Alkitabiah Dan Stewardship Theory (Studi Kasus Pada Institusi kerohanian X Di Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Actual*, 3, 301-310.
- Swanson, G and J. Gardner. 1988. Not-for-profit Accounting and auditing in the early eighteenth century: some archival evidence. *The accounting Review* **63** (3): 436-447.
- Wahyuandari, W. (2020). Akuntabilitas Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Governance of Village. *Jurnal Benefit*, 7(1).
- Wardani, P. A. S. K., Dewi, G. A. K. R. S., & Kurniawan, P. S. (2019). Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 10(No. 2).
- Wahyuandari, W. (2020). Akuntabilitas Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Governance of Village. *Jurnal Benefit*, 7(1).